

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

PSI Sayangkan THR TGUPP Tak Dipotong

Ganbir, Warta Kota

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyalahkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak memangkas Tunjangan Hari Raya (THR) Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). PSI menyebut Anies harusnya turut memangkas THR TGUPP seperti halnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipangkas 50 persen.

Adapun THR PNS dipangkas untuk dialihkan dalam penanganan Covid-19 yang ada di Jakarta. "Ada kabar bahwa menjelang Lebaran anggota TGUPP mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak. Jangan sampai ada kesan Pak Gubernur pilih kasih dalam memberikan tunjangan penghasilan," kata August Hamonangan berdasarkan keterangan resmi Kamis (28/5)

August mengatakan, Anies harus bersikap adil dalam memberikan tunjangan pegawainya. Sebab tidak hanya TGUPP, tapi beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lain justru tidak dipangkas.

"Saya dapat informasi para PNS sedang resah karena ada kabar bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Kominfo akan mendapatkan tunjangan penuh. Padahal, pekerjaan mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi," ujar August yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Menurutnya, tunjangan penghasilan merupakan hal yang penting dan sangat



Padahal, pekerjaan mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi

August Hamonangan Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta

sensitif bagi para pegawai. Karenanya gubernur harus mampu bersikap adil, yaitu memberikan tunjangan berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang terukur dan transparan.

Di satu sisi, pemotongan tunjangan perlu dilakukan karena realisasi pendapatan jeblok akibat pandemi Covid-19, dan sebagian pegawai bekerja dari rumah (work from home). Namun sebagian ada juga pegawai yang tetap menjalankan

Perlu Empati Saat Pandemi

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, meminta kepada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) agar berempati terhadap wabah Covid-19. Apalagi gaji dan tunjangan mereka tidak dipangkas. Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lain turut dipangkas akibat rasionalisasi anggaran.

"Saya harap TGUPP mempunyai empati yang besar, karena para PNS turut bergotong-royong menangani Covid-19 dengan rela tunjangannya dipangkas," kata Mujiyono saat dikonfirmasi Kamis (28/5).

Politisi dari Partai Demorata ini menyebut, gaji maupun tunjangan TGUPP bisa disalurkan melalui Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang dibentuk Pemprov DKI Jakarta. THR yang diperoleh TGUPP merupakan hak yang telah diatur oleh regulasi.

Terlebih, TGUPP telah

memiliki kontrak kerja yang salah satu poinnya berhak mendapatkan uang apresiasi jika telah mengabdikan di Pemprov DKI Jakarta selama satu tahun. "Saya kira donasi personal ke KSBB juga diperbolehkan, tentu dengan kesadaran diri," ujarnya.

"Karena banyak pihak juga, baik anggota dewan, pengusaha bahkan PNS ikhlas menyisihkan pendapatannya untuk penanganan Covid-19," tambah Mujiyono. Menurutnya, DPRD DKI Jakarta telah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 253 miliar untuk membantu penanganan Covid-19 di tengah masyarakat. Seperti anggaran reses, pembahasan pembentukan Perda, pansus, hingga anggaran kunker. "Jadi, tidak sedikit individu anggota dewan yang juga menyisihkan pendapatannya untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19," katanya. **(faf)**

pelayanan masyarakat dan bekerja lebih keras untuk mengatasi pandemi.

"Pemberian tunjangan harus adil agar tidak timbul kecemburuan dan kecurigaan di antara pegawai. Sebagai contoh, saya kira para PNS legowo jika tunjangan 100 persen diberikan kepada tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien Covid-19," ung-

kapnya.

Kata dia, peniadaan pemotongan tunjangan dapat dilakukan kepada pegawai yang benar-benar berpeluh keringat bekerja di lapangan untuk mengatasi pandemi. Misalnya pegawai Kelurahan, Kecamatan, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. **(faf)**